



Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis *Local Wisdom* Dalam Kegiatan Pariwisata Di Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan Kabupaten Samosir

Harles Berman Lumbantobing ¹⁾; Tunggul Sihombing ²⁾

¹⁾ Student of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra

²⁾ Lecturer of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra

Email: ¹⁾ Harlestobing10@gmail.com ; ²⁾ tlumbantoruan@yahoo.co.id

ARTICLE HISTORY

Received [115 November 2022]

Revised [30 November 2022]

Accepted [19 Desember 2022]

KEYWORDS

Implementation of Local Wisdom-Based Community Empowerment Policies, Tourism Activities

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Dalam kebijakan publik tentang kepariwisataan disebutkan bahwa pariwisata bukan hanya membangun infrastruktur namun menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, kearifan lokal dan memberdayakan masyarakat setempat. Oleh karena itu penyelenggaraan kepariwisataan harus berdampak bagi kehidupan masyarakat lokal dan penyelenggaraannya harus mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Untuk itu perlu adanya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berbasis local wisdom dalam kegiatan pariwisata agar tatanan masyarakat yang berpartisipasi dalam pariwisata dapat mandiri dan sejahtera. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat berbasis local wisdom dalam kegiatan pariwisata di desa Lumban Suhi-Suhi Toruan kabupaten Samosir. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian menggunakan teori M.S. Grindle yang menyatakan bahwa implementasi dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu kepentingan-kepentingan terkait, tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, sumberdaya yang digunakan, kekuasaan, kepentingan, dan aktor yang terlibat, karakter lembaga dan rezim yang berkuasa, tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat berbasis local wisdom di desa Lumban Suhi-Suhi Toruan seperti kegiatan martonun sadari, Hita do Hutaraja dan pelatihan tenun ulos masih belum maksimal dilaksanakan. Faktor utamanya adalah kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah desa, daerah, beserta kelompok tenun ulos sehingga menyebabkan manfaat kebijakan yang diperoleh masih kurang dirasakan masyarakat yang diberdayakan.

ABSTRACT

In public policy about tourism it is mentioned tourism is not only building infrastructure but protect human right, cultural diversity, local wisdom and community local empowerment. Therefore, the implementation of tourism must have an impact on the lives of local communities and its implementation must involve the community to participate in implementing these policies. For this reason, it is necessary to implement local wisdom-based community empowerment in tourism activities so that the community structure that participates in tourism can be independent and prosperous. The purpose of this research was to determine the implementation of community empowerment based local wisdom policies in tourism activities at Lumban Suhi-Suhi Toruan village, Samosir Regency. The method used in this study is descriptive qualitative using the theory of M.S. Grindle stated that implementation can be seen from several indicators, namely related interests, type of benefits, degree of change to be achieved, location of decision making, program implementers, resources used, power, interests and actors involved, character of institutions and regimes those in power, and the level of compliance and response from the implementer. The implementation of community empowerment based on local wisdom policies in Lumban Suhi-Suhi Toruan village like Martonun Sadari, Hita Do Hutaraja and ulos weaving training have not been optimally. The obstacle factor because the lack of resources owned by the village and regional governments, along with the weaving ulos group, causing the benefits of the policies obtained to be less felt by the empowered community.

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata merupakan salah satu fokus pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara bahkan menjadi sektor yang cukup penting dalam keberlangsungan perekonomian masyarakat

maupun pemerintah. Kunci keberhasilannya terletak pada pengelolaan yang baik karena di dalamnya terdapat *smokeless industry* yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan sumber devisa negara seperti transportasi, infrastruktur, pelayanan jasa, komunikasi dan akomodasi.

Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir sektor pariwisata memang diproyeksikan sebagai tumpuan ekonomi Indonesia di masa depan. Hal ini terjadi karena melihat potensi wisata alam dan budaya Indonesia yang unik dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini terlihat dari penghasilan devisa yang cukup besar bagi negara dan penghasilan bagi masyarakat.

Pada 2018, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mencatat devisa dari sektor pariwisata Indonesia tahun 2018 tembus US\$ 19,29 miliar atau hampir mencapai target US\$ 20 miliar yang dicanangkan Presiden Jokowi tahun di 2019. Devisa sektor pariwisata mencapai Rp229,5 triliun atau meningkat 15,4 persen secara tahunan sedangkan pada penghujung 2019 pariwisata ditargetkan mencapai devisa 17,6 miliar dollar AS (Rp 246,4 triliun). Penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata juga kian menanjak. Berdasarkan data Kemenparekraf, penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata mencapai 12,7 juta orang atau sekitar 10 persen dari total penduduk Indonesia yang bekerja. (<https://money.kompas.com/read/2019/07/28/172200726/sektorpariwisata-ditargetkan-raup-devisa-rp-246-triliun-di-2019> Diakses pada 8 desember 2020).

Selanjutnya untuk membuat suatu pariwisata menjadi sebuah sistem dilakukanlah pemberdayaan masyarakat dalam upaya untuk mengikutsertakan masyarakat di dalam kepariwisataan. Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat berbasis *local wisdom* dalam kegiatan kepariwisataan pada akhirnya akan memiliki nilai jual sebab masyarakat memiliki budaya yang kuat dan diwariskan turun-temurun, disamping itu masyarakat dapat menggerakkan sektor ekonomi dari kebudayaan yang melekat pada mereka. Secara tidak langsung budaya yang dipromosikan dalam bingkai pariwisata akan mempertahankan pengetahuan lokal di dalam masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat berbasis *local wisdom* dalam pariwisata menjadi cara yang efektif dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Peraturan Bupati No 3 Tahun 2020 Kabupaten Samosir tentang alokasi dana desa sebagian diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat. Selain itu di wilayah Samosir ada PERDA Kabupaten Samosir No. 2 Tahun 2006 Tentang pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat.

PERDA Kabupaten Samosir No.2 Tahun 2006 dibuat dengan tujuan pelestarian kearifan lokal yang ada di Samosir sekaligus menyatakan adanya pengakuan dan penerimaan terhadap kebudayaan masyarakat dan lembaga-lembaga adat yang ada di kabupaten Samosir sendiri. Pengakuan dan adanya pemberdayaan terhadap masyarakat adat dan kearifannya diyakini akan menunjang keberlangsungan pembangunan Nasional dan Daerah sekaligus kebudayaan lokal yang perlu diberdayakan, dibina dan dilestarikan.

Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan terletak di Kabupaten Samosir merupakan salah satu desa yang potensial dalam menerapkan kebijakan pemberdayaan masyarakat berbasis *local wisdom*. Penduduk desa Lumban Suhi-Suhi Toruan umumnya berprofesi petani, nelayan dan pengrajin *ulos* dimana laki-laki biasanya bertani dan perempuan membuat *ulos* untuk pakaian dan keperluan upacara adat Batak. Pengetahuan membuat *ulos* telah dipelajari sejak dulu dan diwariskan turun-temurun.

Kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah desa dalam menunjang kegiatan pariwisata dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat berbasis *local wisdom* yaitu *martonun sadari* kegiatan yang dilaksanakan dua hari dalam seminggu yaitu pada hari Selasa dan Sabtu dari mulai pukul 09.00-17.00 Wib. Dalam acara yang diberi nama *Martonun Sadari* masyarakat ikut serta memperkenalkan pengetahuan tradisional dari suku Batak yaitu *martonun ulos* (membuat *ulos* atau kain Batak). Dalam kegiatan ini masyarakat yang terlibat adalah kaum ibu-ibu yang menenun *ulos* dan tergabung dalam kelompok tenun Hutaraja.

Kebijakan pemberdayaan masyarakat berbasis *local wisdom* dalam kegiatan wisata yang dilaksanakan di desa Lumban Suhi-Suhi Toruan seperti *Martonun Sadari*, pemberdayaan *ulos* dan melalui kelompok-kelompok tenun memang belum dilaksanakan secara maksimal. dalam hal pengimplementasian kebijakan masih sepenuhnya mengadopsi model *western administration* sebagai penggerak adalah menjalankan sebuah kebijakan padahal untuk mengimplementasikan secara maksimal pemerintah seharusnya menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada yaitu *indigeneous public administration* yaitu konsep untuk mengisi kekosongan yang ada dalam *western public administration*.

Peran pemerintah dalam menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*enabling*) belum maksimal. Faktanya, di desa belum tercipta iklim berkembangnya potensi masyarakat terutama di dalam kelompok tenun karena kegiatan pelatihan kelompok tenun yang belum dilakukan secara masif dan berkesinambungan. pelatihan pembuatan *ulos*



sendiri baru dilakukan dua kali dalam 1 tahun belakangan hal ini tidak sebanding dengan perkembangan kuantitas setiap kelompok yang sangat pesat.

Selanjutnya, dalam memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*) melalui pemberian masukan (input) berupa bantuan dana, pembangunan prasarana, pengembangan lembaga pendanaan, penelitian dan pemasaran serta pembukaan akses berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. pada *empowering* ini pemerintah Lumban Suhi-Suhi Toruan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, Dinas Budpora dan lembaga diluar pemerintah sudah melakukan berbagai program pelatihan tenun, pelatihan *manggatip* (menciptakan motif tenun) dan pewarnaan alami untuk mewarnai *ulos*.

Dalam perlindungan terhadap masyarakat belum ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa misalnya dalam kondisi masa pandemi yang menyebabkan harga *ulos* tidak laku dipasaran ataupun harga menurun drastis pemerintah tidak bisa berbuat banyak untuk meringankan beban masyarakat.

Dari berbagai masalah umum tersebut akar masalah menurut penulis terletak pada sumber daya manusia dan aktor pelaksana yang kurang memiliki kompetensi dalam melaksanakan pemberdayaan berbasis *local wisdom* dalam kegiatan pariwisata di Lumban Suhi-Suhi Toruan. Grindle secara jelas mengatakan implementasi akan berhasil apabila isi kebijakan seperti sumber daya dan lingkungan kebijakan seperti kepatuhan kelompok sasaran dijalankan dengan maksimal.

LANDASAN TEORI

Kebijakan Publik

Dye (dalam *Abidin*: 2012:18) berpendapat bahwa kebijakan sebagai pilihan pemerintah melakukan atau tidak melakukan sesuatu, berbeda dengan itu Friedrich mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah adanya tujuan, sasaran atau kehendak (*purpose*). Jadi dapat dikatakan kebijakan publik adalah tindakan pemerintah untuk mengatasi segala permasalahan yang ada pada publik atau masyarakat.

Implementasi Kebijakan

Ripley and Franklin (dalam Winarno 2016:134) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata. Istilah implementasi tersebut merujuk pada tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Selain itu, implementasi kebijakan menurut Richard Rose (dalam Winarno 2002:55) mengemukakan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu (Solichin 2002:5).

Model Implementasi Kebijakan

Model adalah sebuah kerangka sederhana yang merupakan sebuah usaha untuk memudahkan penjelasan terhadap suatu fenomena (Indiahono 2009:19). Pada prinsipnya terdapat dua pemilihan jenis model implementasi kebijakan publik yaitu implementasi kebijakan publik yang berpola dari atas ke bawah (*topdown*) dan dari bawah ke atas (*bottom-up*), serta pemilihan implementasi kebijakan publik yang berpola paksa (*command and control*) dan pola pasar (Nugroho 2003: 167).

Adapun, keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle juga amat di tentukan oleh tingkat implementability yang terdiri atas content of policy dan context of policy.

1. *Content of policy* menurut Grindle adalah:

- a. *Interest affected*
- b. *Type benefits*
- c. *Extent of change envision*
- d. *Site of decision making*
- e. *Program Implementor*
- f. *Resources Committed*

2. *Context of Policy* menurut Grindle adalah:

- a. Kekuasaan,kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat
- b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa
- c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sulistiyani (2004:77) secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata “daya” berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian Sulistiyani tentang pemberdayaan, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat menurut Madiun (2008: 54) dapat dilihat sebagai sebuah aktivitas masyarakat lokal untuk mempromosikan berbagai nilai dan menciptakan suatu masyarakat yang diisi dengan energi dengan memanfaatkan alam, budaya, sejarah, industri, orang-orang yang mempunyai bakat, dan sumber-sumber daya lainnya secara penuh.Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat menginginkan seluruh komponen dan anggota masyarakat untuk berpikir, berdiskusi, dan mengambil tindakan-tindakan nyata.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan realitas secara konsektual, interpretasi terhadap fenomena yang menjadi perhatian peneliti dan memahami perspektif partisipan terhadap masalah yang terjadi. Kemudian, pendekatan deskriptif memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual dan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya dan diiringi dengan interpretasi rasional.

Dalam memperoleh data penelitian peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi dan dan dokumentasi. Sementara untuk menguji keabsahan datanya penulis menggunakan triangulasi data. Melalui teknik pemeriksaan keabsahan data ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi metode, tringulasi penyelidikan dan triangulasi teori di mana data dikumpulkan dari narasumber serta dikaitkan juga dengan teori-teori yang digunakan dan dipahami oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam teori implementasi kebijakan Merilee S Grindle juga menetapkan bahwa isi kebijakan menjadi hal yang penting dalam proses pengimplementasiannya, dimana ia mengkategorikan bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan apabila isi kebijakannya memiliki enam kriteria yang ia maksudkan, yaitu kepentingan-kepentingan terkait, jenis manfaat yang diperoleh, perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumber-sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan. selain itu dalam konteks atau lingkungan kebijakan /ada tiga kriteria yaitu Variabel lingkungan kebijakan mencakup: Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi dan rejim yang berkuasa dan tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Kepentingan Terkait Dalam Kebijakan Pemberdayaan Berbasis *Local Wisdom* Dalam Pariwisata

Teori dari Grindle menyampaikan proses kebijakan dilaksanakan bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-administrator atau birokrat-birokrat pada level bawahnya. Karenanya setiap Aktor-aktor penentu kebijakan akan berusaha menempatkan kepentingan mereka pada kebijakan-kebijakan yang melibatkan minat mereka, sehingga kepentingan mereka terakomodasi di dalam kebijakan.

Kebijakan Pemberdayaan Berbasis *Local Wisdom* di Lumban Suhi-suhi dalam kegiatan Pariwisata merupakan implementasi dari UU No.6 tahun 2014 tentang desa yang kemudian dirumuskan dalam RPJMDes dan visi misi desa, UU No 10 tahun 2009 tentang kepariwisaaan dan PERDA Kabupaten



Samosir No.25 Tahun 2006 tentang pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan.kebiasaan masyarakat dan lembaga adat.

Adapun pihak-pihak kepentingan dalam pemberdayaan masyarakat di Lumban Suhi-Suhi Toruan yaitu Kelompok Tenun Hutaraja (Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan), Dinas Pariwisata sebagai aktor pelaksana dalam kegiatan pariwisata di Samosir, Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Samosir, Pemerintah Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan yang memiliki keterlibatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis *local wisdom* dalam kegiatan pariwisata di Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan, lembaga swasta seperti Toba Tenun, dan Masyarakat desa Lumban Suhi-Suhi Toruan.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi kepentingan didalam kebijakan pemberdayaan masyarakat berbasis *local wisdom*, penulis menginterpretasikan setiap kepentingan memiliki hubungan satu sama lain karena pariwisata yang ditawarkan di desa ini merupakan salah satu sarana untuk melestarikan budaya maka dari itu konflik kepentingan antar aktor-aktor pelaksana minim dan dapat diminimalisir. Adapun yang perlu dimaksimalkan adalah perlu adanya kolaborasi antara pihak-pihak yang berkepentingan yang sama mengingat selama ini pelaksanaan pemberdayaan berbasis *local wisdom* masih sebatas koordinasi antara *stake holder* belum adanya kolaborasi dalam mengadakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Tipe Manfaat Kebijakan Yang Diperoleh

Implementasi kebijakan menurut Richard Rose (dalam Winarno 2002:55) mengemukakan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Hal ini sama dengan teori Grindle yang mempertimbangkan manfaat sebagai indikator untuk menggambarkan keberhasilan suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh implementor.

Secara manfaat kegiatan *Martonun Sadari* memang masih minim dalam membuat masyarakat berdaya dan mandiri sebagaimana tujuan dari pemberdayaan masyarakat yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Implementor atau pemerintah desa dalam proses memandirikan masyarakat sudah melakukan pembinaan melalui interaksi langsung dengan kelompok tenun *ulos* terutama dalam membagikan pengetahuan dalam berinteraksi dengan wisatawan dan menjelaskan tentang cara-cara pembuatan *ulos* . adapun manfaat yang belum dirasakan disebabkan oleh wabah covid-19 yang berimbas pada berkurangnya wisatawan untuk datang berkunjung ke dusun Hutaraja Lumban Suhi-Suhi Toruan.

Program pemberdayaan pengrajin *ulos mangiring* bermanfaat dalam segi ilmu pengetahuan karena masyarakat diajarkan dalam pewarnaan alami untuk *ulos* namun secara ekonomi kurang berdampak karena para penenun tidak memproduksi *ulos* yang dilatih dengan pewarnaan alami secara masif atau *continuous process* melainkan memproduksinya hanya untuk stok atau dijual secara online karena dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari para pengrajin *ulos* di Lumban Suhi-Suhi Toruan lebih memilih menenun *ulos* jenis *karo* (kain yang dipakai masyarakat karo dalam prosesi adatnya).

Derajat Perubahan

Suatu kebijakan yang dibuat harus memiliki banyak manfaat sekaligus memberikan perubahan yang membangun kesejahteraan masyarakat. Adapun yang ingin dijelaskan dalam penelitian ini adalah seberapa besar sebuah kebijakan dibuat memberikan perubahan yang hendak ingin dicapai melalui suatu proses implementasinya.

Pelaksanaan pemberdayaan berbasis *local wisdom* dalam kegiatan pariwisata di Lumban Suhi-Suhi Toruan memang dilaksanakan agar masyarakat ikut terlibat sebagai pelaku wisata yang sadar akan budaya dan pelestariannya. Keterlibatan masyarakat secara langsung memberikan keuntungan kepada wisatawan karena dapat melihat pembuatan *ulos* dengan memakai alat tenun tradisional *gundongan*.

Perubahan yang diinginkan oleh Dinas Budpora Samosir belum sepenuhnya tercapai pada masyarakat karena tenun yang diberdayakan pada akhirnya belum dapat diproduksi secara masif karena persoalan ekonomi dan pasar. Hal ini terlihat dari Masyarakat yang lebih memilih menenun *ulos* jenis Karo karena lebih menguntungkan secara ekonomi dan efisien dalam mengerjakan padahal kebijakan ini bermaksud agar masyarakat melihat kebijakan pemberdayaan ini sebagai ajang untuk pelestarian dan memaknai *ulos* sebagai tradisi dan budaya yang harus dipertahankan bukan cuma dari sisi ekonomi (untung dan rugi). *ulos* Karo memang dapat diselesaikan 2-3 lembar per minggu sedangkan jenis *ulos mangiring* yang diberdayakan 1-2 lembar per minggu. Namun bila dilihat dari pelestarian nilai-nilai budaya termasuk pengetahuan tradisional dan alat-alat tradisional dalam pembuatan *ulos* ini sudah dapat tercapai.

Selain itu, Pihak pemerintahan desa menginginkan terjadi perubahan di masyarakat dalam aspek kesadaran sebagai pelaku-pelaku pariwisata sekaligus menjaga tradisi dan pengetahuan lokal dalam menenun *ulos*. hal ini, sudah tercapai karena masyarakat sebagai pelaku wisata sudah ramah kepada wisatawan yang berkunjung salah satunya dengan menawarkan berbagai jenis *ulos* Batak dan

Sumber daya manusia dan aktor pelaksana dalam implemtasi kebijakan pemberdayaan masyarakat berbasis *local wisdom*

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang ada. Sumber daya dalam suatu instansi akan berpengaruh terhadap kinerja suatu kebijakan. Selain itu, dalam menjalankan suatu kebijakan harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya manusia pelaksana kebijakan secara kuantitas memang tidak cukup dalam melaksanakan seluruh pemberdayaan yang ada di desa Lumban Suhi-Suhi Toruan dikarenakan perbandingan perangkat desa yang berjumlah 6 orang ditambah 3 orang kepala dusun sangat sedikit dibandingkan banyaknya kelompok-kelompok maupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di desa Lumban Suhi-Suhi Toruan dan harus didampingi namun strategi yang dijalankan oleh pemerintah desa adalah memposisikan pemuda dan mahasiswa (KKN) sebagai pelaksana dalam pelaksanaan pemberdayaan berbasis *local wisdom* dalam kegiatan pariwisata. Keberadaan mahasiswa dan pemuda setempat yang sedang dalam masa perkuliahan akan menambah kuantitas sekaligus kuliatas pemerintah desa dalam mengadakan kegiatan-kegiatan maupun pemberdayaan kepada masyarakat terutama membantu dari segi teknologi dan ide-ide yang inovatif dan bervariasi misalnya dalam menyebarkan kegiatan pariwisata dan mendokumentasikan kegiatan yang sedang dilakukan.

Selanjutnya, secara kualitas pemerintah desa masih kurang maksimal dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat berbasis *local wisdom* ini karena pemberdayaan ini membutuhkan keahlian khusus dan pemaknaan dalam tradisi misalnya membuat *ulos* lebih baik akan diwakilkan oleh masyarakat desa atau pembuat *ulos* yang berpengalaman dan tahu manfaat dan kegunaan *ulos* secara tradisi untuk menjadi intruktur pemberdayaan pembuatan *ulos* agar pelaksanaannya berkualitas dan masyarakat dapat memaknai kembali tradisi *ulos*. hal ini dilakukan dengan kolaborasi dengan Dinas Kebudayaan di Kabupaten Samosir.

Selain itu, penulis melihat aktor pelaksana sudah berkomitmen dalam melaksanakan kebijakan ini. hal ini dibuktikan dengan kebijakan ini dilaksanakan dengan fasilitator dari pihak swasta yang ahli dibidang pembuatan *ulos* dan memahami motif-motif *ulos* dan pewarnaan alami *ulos* Batak.

Kekuasaan Kepentingan Dan Strategi Dalam Kebijakan Pemberdayaan Berbasis *Local Wisdom*.

Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan kebijakan yang diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.

Dalam budaya dan sosial masyarakat Lumban Suhi-Suhi Toruan masih memegang budaya-budaya leluhur termasuk dalam penyelenggaraan *event-event* wisata. Di Desa ini masih ada *natua-tua ni huta* maka dalam setiap pelaksanaan kebijakan pemerintahan desa Lumban Suhi-Suhi Toruan harus melibatkan *natua-tua nihuta* karena pengaruh adat-istiadat yang masih kental misalnya dalam mengadakan *Event Hita Do Hutaraja* pemerintah desa harus meminta izin kepada *natua-tua ni huta* agar dusun Hutaraja Pardamean dapat digunakan sebagai tempat penyelenggaraan event pemerintah desa

Kepentingan ini bisa digunakan oleh pemerintah desa atau *stake holder* dalam memperkuat kerjasama diantara para pihak misalnya dengan mengajak kerjasama *natua-tua* demi mengembangkan wisata Hutaraja dengan menampilkan upacara-upacara adat. Peran *natua-tua* dalam kebijakan ini dapat menjadi sumber informasi terutama dalam penghayatan dan pemaknaan kembali nilai-nilai di masyarakat Lumban Suhi-Suhi Toruan misalnya dalam menghayati upacara-upacara adat yang dilaksanakan, menghayati makna *ulos* dalam tradisi bangsa Batak.

Karakteristik rezim pelaksana, Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap.

Pemerintahan desa memiliki karakteristik terbuka dalam menjalankan pemberdayaan berbasis *local wisdom* yang ada di Lumban Suhi-Suhi Toruan. Hal ini terlihat dari proses musrembang desa yang dilakukan melalui musyawarah dusun dan musyawarah kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok tenun, nelayan, kelompok tani dan PKK. Proses dalam mengetahui permasalahan desa melalui musyawarah desa menjadi dasar penulis melihat bahwa pemerintah desa dalam mengambil keputusan atau kebijakan di desa selalu berdasarkan kepada permasalahan yang ada di masyarakat.



Selain dari musyawarah yang diadakan oleh pemerintah desa pelibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh pemerintah desa menjadikan masyarakat memiliki kepercayaan terhadap pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat dalam pariwisata. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa bisa dilihat dari kepatuhan masyarakat dalam keikutsertaan dalam *Marthon Sadari* maupun dalam event *hita do Hutaraja 2* terutama dalam melibatkan seluruh lapisan masyarakat karena hampir keseluruhan acara diisi oleh masyarakat yang merupakan hasil dari latihan dan pembinaan dengan pemerintahan desa.

Tantangan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis *Local Wisdom* Dalam Kegiatan Pariwisata

Pada setiap implementasi sebuah kebijakan pasti memiliki tantangan dan Peluang dalam melaksanakan dan menerapkan sebuah kebijakan hal ini terjadi pada kebijakan pariwisata, pemberdayaan dan *local wisdom*.

tantangan dalam mewujudkan dan memaksimalkan Implementasi Kebijakan pemberdayaan masyarakat berbasis *local wisdom* dalam kegiatan pariwisata terletak pada pelaksanaan kebijakan. Kebijakan pemberdayaan masyarakat berbasis *local wisdom* dalam kegiatan pariwisata masih diterapkan dan dilaksanakan seperti kebijakan pada umumnya di Indonesia padahal kebijakan ini adalah kebijakan yang berbeda dengan kebijakan yang umum karena kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik yang cukup unik dan berbeda baik dalam segi sosial masyarakat, suku bangsa, adat istiadat, geografis, dan juga kemajemukan budaya yang ada.

Dalam prakteknya kebijakan pemberdayaan masyarakat berbasis *local wisdom* di Lumban Suhi-Suhi Toruan harus diterapkan dengan konsep kebijakan *Western public administration* dengan diiringi konsep *Indigenous Public Administration* yaitu suatu konsep yang dikonstruksi untuk mengisi ruang kosong yang tidak ditempati oleh *Western Public Administration*.

Representasi indigenous adalah indigenization yaitu sistem administrasi lokal atau tradisional namun bukan sederhana. Indigenization berarti upaya untuk membuat implementasi atau administrasi supaya sesuai dengan kultur lokal. Indigenization dapat berarti upaya untuk mentransformasi *administration, government, dan governance* yang selaras dengan kultur setempat.

Pada prinsipnya kekuasaan diluar dari pemerintahan di Lumban Suhi-Suhi Toruan yang sangat berpengaruh di masyarakat yaitu Tokoh masyarakat atau *Natua-tua* bisa dimanfaatkan oleh pemerintah desa maupun daerah dalam memaksimalkan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan berbasis *local wisdom* di Lumban Suhi-Suhi Toruan. peran *Natua-tua* di dalam implementasi adalah sebagai seorang pembimbing dalam pembuatan *ulos* maupun sebagai orang yang berbagi pemahaman tentang nilai-nilai budaya dari sebuah *ulos* tradisional.

Indigenous Public administrasion akan menentukan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang akan berfokus kepada potensi masyarakat dan kekayaan budaya di dalam masyarakat Lumban Suhi-Suhi Toruan. Model administrasi publik yang berbasis pada indigenous dilaksanakan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan administrasi berdasarkan konteks yang berbasis pada nilai-nilai budaya, adat istiadat dan agama. Dia lahir berangkat dari suatu pikiran adanya *multiple solutions to problems of public administration*. Administrasi yang solutif adalah administrasi yang melibatkan (mempertimbangkan) tradisi-tradisi lokal. Kebijakan ini diharapkan melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk *natua-tua ni huta*, kelompok-kelompok tenun, dan masyarakat lokal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan kepentingan aktor pelaksana implementasi pemberdayaan masyarakat berbasis *local wisdom* mempunyai kepentingan yang berbeda-beda namun tidak ada konflik kepentingan karena kepentingan yang ada masih terhubung satu sama lain. Para pelaksana perlu untuk membuat kolaborasi yang erat agar implementasi kebijakan ini dapat berjalan maksimal.
2. Dari segi manfaat kebijakan pemberdayaan masyarakat berbasis *local wisdom* masih belum maksimal karena dampak pandemi selain itu kurangnya manfaat dalam segi pemaknaan terhadap tradisi-tradisi *local* mengakibatkan para penerima manfaat lebih mempertimbangkan manfaat secara ekonomi daripada pemaknaan dan pelestarian terhadap nilai-nilai budaya *ulos*.
3. Derajat perubahan yang diakibatkan oleh kebijakan ini belum terlihat masif karena ekonomi kreatif yang menjadi tujuan dari kebijakan belum maksimal selain itu perspektif masyarakat dalam menenun

ulos Batak belum mengalami perubahan signifikan terutama dalam orientasi dalam menenun *ulos* dimana masih berorientasi pada hasil ekonomi dari *ulos* bukan pelestarian budaya.

4. Sumberdaya dan aktor pelaksana dalam implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat berbasis *local wisdom* dalam kegiatan pariwisata secara kuantitas dan kualitas masih kurang namun pemerintah punya strategi yaitu mengikut sertakan mahasiswa KKN dan pemuda desa dalam melaksanakan kebijakannya. Selain itu aktor pelaksana dalam kebijakan berkomitmen dalam melaksanakan kebijakan meskipun kapasitas dalam memberdayakan masih kurang namun strateginya adalah melibatkan pihak swasta yang berkompeten dan berkapasitas.
5. Dalam kekuasaan, kepentingan dan strategi pelaksana harus melibatkan *natua-tua nihuta* dalam pelaksanaan kebijakan karena memiliki pengaruh yang luas dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat desa, selain itu pelibatan ini akan menjadi strategi yang baik untuk melaksanakan kebijakan pemberdayaan ini.
6. Berdasarkan karakteristik rezim pelaksana, tingkat kepatuhan dan daya tanggap pelaksana kebijakan pemerintah sudah melakukan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pemerintah desa juga melakukan musyawarah dari tingkat dusun sampai tingkat desa untuk mendengarkan dan melibatkan masyarakat dalam kebijakan.
7. Tantangan implementasi adalah pemerintah harus menerapkan *western public administration* dilengkapi dengan *indigenoous public administration*. Sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan melibatkan peran *natua-tua ni huta, kelompok tenun ulos* dan masyarakat lokal secara penuh.

Saran

1. Pihak-pihak berkepentingan yang terkait dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis *local wisdom* di desa Lumban Suhi-Suhi Toruan, terkhususnya pemerintah Desa, Dinas pariwisata, Dinas Budpora dan Kelompok Tenun dan Natua-tua ni huta, saling bersinergi dalam mengembangkan dan mengawasi tiap-tiap kelompok-kelompok sasaran yang dibentuk dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Tidak hanya memberikan sarana melainkan juga prasarana kepada masyarakat, agar kelompok yang terbentuk dapat berjalan berkesinambungan menjadi kelompok mandiri dalam segala aspek.
2. Pihak-pihak berkepentingan yang terkait dalam kegiatan pemberdayaan berbasis *local wisdom* dalam pariwisata di Lumban Suhi-Suhi Toruan perlu menyediakan ruang pelatihan kepada pelaksana kebijakan, agar memiliki kompetensi yang cukup dalam mengerjakan kegiatan pemberdayaan, khususnya Kelompok Tenun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Wahab Solichin. 2008. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara
- Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik, Jakarta. Penerbit Salemba Humanika
- Aziz, Moh Ali dkk. 2005. Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi Metodologi. Yogyakarta : PT. LKiS Pelangi Nusantara.
- <https://money.komps.com/read/2019/07/28/172200726/sektor-pariwisata-ditargetkan-raup-devisa-rp-246-triliun-di-2019> dikses desember 2020
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, Lexy. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nugroho, Riant. (2009). Publik Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Peraturan Bupati No 3 Tahun 2020 Kabupaten Samosir.
- Peraturan Daerah Kabupaten Samosir No. 2 Tahun 2006
- Sulistiyani, A.T. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Jogjakarta :Gava Media
- Syahputra, B., Suripsto & Yulvia C. 2018. Indigeneous Public Administration: Melihat Administrasi Publik Dari Perspektif Kearifan Lokal (Local Wisdom), Jurnal Ilmu Administrasi. Volume XV No.2.
- Tachjan, Prof. H. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Panduan
- Undang-Undang No 10 tahun 2009
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014